

ANALISIS FAKTOR DAN KEBIJAKAN PENENTUAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS (STUDI KASUS: SINGHASARI)

Denisa Noviaristi^a

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Corresponding author: *denisanoviaristi@gmail.com*

Artikel Info

Article history:

Received 21/01/2023

Revised 07/06/2023

Accepted 09/06/2023

Available online 26/06/2023

Keyword: Decentralization;
Special Economic Zones;
Regional Financial
Independence

JEL Classification
G38, O18, O20

Copyright (c) 2023
Noviaristi, D.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

Development areas are accelerated in a decentralized manner through public financial policies, an approach process as determined by public policies in certain areas, and a w of modernization of decentralization on for celebrating the economy, namely through KEK (Special Economic Zones) as regional optimization. The island of Java in 2019 for its economic growth reached 56% of the national (according to BPS data the acceleration of the economy of the island of Java has become one of the focuses of national development, one of the SEZs on Java Island, namely SEZ Singhasari which is in Singosari District, Malang Regency with the formulation the problem of how the influence of the regional financial independence ratio on the determination of the Singhasari Special Economic Zone and the influence of regional original income and balancing funds on regional spending. The results of the research show that the ratio of delegative independence as a whole is a ratio without statesst public financial policies are running well in Malang Regency. The regression results state that regional original income and balance funds have a positive and significant effect on regional spending so that all fiscal activity in Malang Regency supports the acceleration of the economy in the Singhasari Special Economic Zone in Singosari District, Malang Regency.

Abstrak

Wilayah pembangunan dilakukan percepatan secara desentralisasi melalui kebijakan financial public, proses pendekatan sebagaimana ditetapkan kebijakan publik di dalam wilayah tertentu, salah satu bentuk modernisasi desentralisasi atas percepatan ekonomi yaitu melalui KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) sebagai optimalisasi wilayah. Pulau Jawa di tahun 2019 atas pertumbuhan ekonominya mencapai 56% dari nasional (menurut data BPS) sehingga percepatan

ekonomi pulau Jawa menjadi salah satu fokus di dalam pembangunan nasional, salah satu KEK di Pulau Jawa yaitu KEK Singhasari yang berada di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari dan pengaruh pendapatan asli daerah serta dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian delegatif secara keseluruhan rasio yang menyatakan bahwa kebijakan finansial publik berjalan dengan baik di Kabupaten Malang. Hasil regresi menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sehingga segala aktivitas fiskal di Kabupaten Malang mendukung atas percepatan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh negara yang tujuannya adalah melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah modernisasi yang bertujuan untuk memajukan bangsa. Upaya pembangunan ekonomi modern salah satunya dengan percepatan ekonomi. Percepatan ekonomi adalah keadaan di mana negara berusaha untuk mengembangkan ekonomi dengan cepat untuk mencapai hasil terbaik. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dengan percepatan ekonomi di Indonesia adalah melalui desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan segala keputusan dan konsekuensinya. Tujuan dari desentralisasi ini adalah agar setiap daerah dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah dengan melihat kemampuan daerah tersebut untuk mandiri secara ekonomi. Dari perspektif nasional, diharapkan desentralisasi ini akan mengarah pada pembangunan yang lebih terstruktur dan cepat, karena pembangunan didasarkan pada kebutuhan daerah.

Salah satu prinsip desentralisasi adalah adanya otonomi daerah, yaitu suatu cara penyelenggaraan negara untuk mengakui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Apabila daerah mampu mandiri secara ekonomi, maka dapat mendukung perekonomian nasional yang berupaya pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat secara merata.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan otonomi daerah tersebut dengan melalui ketetapan (Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004, 2004) (Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2004, 2004) (Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1999, 1999) (Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, 1999)

Pelaksanaan peraturan ini dilakukan dengan mewajibkan pemerintah daerah sebagai pengatur perekonomian daerah dan menggunakan perimbangan pemerintahan pusat sebagai pendapatan yang dapat digunakan untuk memajukan perekonomian daerah. Pengelolaan ekonomi daerah dimulai dari Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab harus bisa menggunakan dana dengan benar. Kemampuan pemerintahan menunjukkan bahwa kemandirian daerah terletak pada kepemimpinan perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dalam pengelolaan potensi daerah menunjukkan penilaian terhadap efisiensi daerah, karena daerah menggunakan pendapatan tersebut dalam pembangunan daerah. Selain pendapatan kota itu sendiri, pemerintah pusat dan provinsi memberikan dana dari APBN dan APBD sebagai dana perimbangan, yang kemudian dapat dikelola dan dimanfaatkan bersama dengan pendapatan asli daerah. Suatu daerah dianggap mandiri apabila daerah tersebut menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari dana perimbangan, karena hal tersebut merupakan tanda bahwa daerah tersebut dapat dikatakan mandiri secara ekonomi.

Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan analisis perhitungan rasio dengan melihat kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan untuk dalam rangka mengelola keuangan daerah yang transparan, jujur, efisien, efektif dan akuntabel. Berdasarkan analisis tren dapat digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan dan efisiensi penggunaan pembiayaan daerah. Sehingga negara dapat menggunakan ketetapan ini untuk meningkatkan pengelolaan ekonomi daerah lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

Percepatan ekonomi dilakukan dalam upaya penyelenggaraan penguatan investasi ekonomi, infrastruktur, fungsi demografi serta pelaksanaan penguatan geografis. Percepatan pembangunan ekonomi yang merata diharapkan terwujud atas keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 19 (Sembilan belas) lokasi yang berbeda yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud pemerataan. Secara garis besar KEK berpangku atas inklusi ekonomi sektoral yang saling terintegrasi sehingga secara agregat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu KEK

yang terdapat di Jawa Timur sebagai upaya penguatan ekonomi di kepulauan Jawa berada di Gresik dan Kecamatan Singosari yang terletak di Kabupaten Malang atas pemilihan dan pengembangan kawasan KEK di Kabupaten Malang merupakan bentuk keterlibatan aktivitas ekonomi dengan pola aglomerasi wilayah yang nantinya menarik untuk dikaji sebagai suatu penelitian atas latar belakang pemikiran otonomi daerah berbasis sektoral melalui pendekatan keuangan public yang ada di daerah.

Wilayah administratif Malang yang memiliki potensi alam melimpah, berbatasan dengan beberapa wilayah yang dengan ciri geografis yang mirip. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Di selatan dengan Samudera Indonesia. Di sisi barat, Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis tersebut menjadikan Kabupaten Malang sebagai kawasan yang strategis karena dikelilingi oleh jalur transportasi darat, laut, dan udara yang semakin baik. Kawasan strategis ini harus dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, untuk pengembangan ekonomi nasional yang dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu penetapan wilayah di Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Singosari memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Dengan adanya penetapan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Malang maka dapat di analisis kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerah. Seberapa baik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malang sehingga salah satu wilayahnya dapat ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Potensi yang ada pada kawasan ekonomi khusus tersebut tentu nantinya dapat berpengaruh pada keuangan daerah Kabupaten Malang. Dengan ditetapkannya kawasan ekonomi khusus Kecamatan Singosari ini maka akan membantu tujuan nasional dalam program percepatan ekonomi yang direncanakan.

Percepatan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus Singosari ini difokuskan pada zona pariwisata dan zona teknologi. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Singosari tentunya dapat mempengaruhi implementasi perkembangan kawasan tersebut. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh pada pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan produktivitas. Kondisi sosial dan kesejahteraan penduduk daerah berada pada tingkat pendidikan dan kesehatan yang setinggi-tingginya, yang tercermin dari tersedianya fasilitas umum yang ada. Kondisi ini juga tercermin dari kualitas sumber daya manusia. Secara ekonomi sebagian masyarakat masih bergantung pada sektor primer yaitu pertanian. Selain itu, industri dan perdagangan juga mendukung sektor-sektor yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat dan mata pencaharian lainnya. Namun, dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini dapat menjadi terobosan baru dalam perekonomian Kecamatan Singosari untuk mengembangkan perekonomian di sektor lain. Aktivitas ekonomi yang

ada di KEK Singhasari menarik untuk dikaji melalui pendekatan keuangan daerah dengan indikator-indikator keuangan public salah satunya adalah kemandirian daerah sebagai acuan kerja daerah dan sebagai bahan evaluasi atas terpenuhinya syarat Kecamatan Singosari sebagai Kecamatan yang memang patut dijadikan salah satu KEK di Jawa Timur.

Hasil penelitian Oesi Agustina (2013) menyatakan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang di era otonomi daerah berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,75% (<25%), rasio efektivitas persentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil dan sangat efektif, rasio efisiensi Kota Malang prosentase rata-ratanya dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal, rasio aktivitas Pemerintah Kota Malang di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan Kota Malang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami *tren* positif (PAD dan Pendapatan Daerah) meskipun ada juga yang mengalami *tren* negatif

Selanjutnya, penelitian Febby Randria Ramadhani (2016) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif. *Tren* kemandirian keuangan daerah menunjukkan *tren* positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. *Tren* efektivitas keuangan daerah menunjukkan *tren* positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Selanjutnya, penelitian Dori Saputra (2014) menyatakan bahwa hasil penelitian di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. Rasio efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. *Tren* kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. *Tren* efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.

Dalam penelitian selanjutnya oleh Eky Ermal Muttaqin, Warsani Purnama Sari, Pandapotan Ritonga dan Dinda Fadillah (2021) menjelaskan tentang pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat.

Selanjutnya, penelitian dari Rahmi Aminus (2018) juga menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempengaruhi belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir

Dengan adanya penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melakukan pembaharuan seperti pada variabel yang akan diteliti yang nantinya akan memberikan hasil yang berbeda pada perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dan pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta belanja daerah sebagai variabel dependen.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan data kuantitatif dalam penelitian ini. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam angka atau bilangan. Dalam penelitian ini data ringkasan Anggaran APBD dan data ringkasan Realisasi APBD digunakan sebagai data kuantitatif, dengan komponen pelaporan yang digunakan sebagai data olahan, sifat data berupa dokumen *financial public* yang mendukung perhitungan kekuatan keuangan. Data sekunder adalah hasil pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik oleh pengumpul data primer atau pihak lain, sedangkan menurut para ahli lainnya, data sekunder digunakan untuk memverifikasi kejadian yang ditemukan peneliti dan kejadian sesuai dengan tujuan penelitian. (Moleong, 2014 dalam Alir, D.2005). Sumber data untuk penelitian ini adalah dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Yaitu informasi yang peneliti terima secara tidak langsung melalui media (diperoleh atau dipelihara oleh pihak lain). Data sekunder adalah bukti, catatan atau catatan terdahulu yang disusun dalam arsip atau rekaman.

Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Malang dengan objek penelitian dari laporan keuangan daerah menggunakan variabel belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan serta komponen yang diperlukan dalam perhitungan rasio kemandirian daerah.

Metode Analisis

Kemandirian Keuangan Daerah

Tahap ini merupakan tahap analisis data untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan perhitungan rasio keuangan dan membuat interpretasi hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif terhadap data *time series* yang didapatkan dengan tujuan mencari permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan tolok ukur sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan perekonomian daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dapat dilihat dari seberapa mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangan. Suatu daerah diharapkan dapat mengimplementasikan

pengembangan dan layanan masyarakat tanpa transfer pendanaan pemerintah pusat.

Rasio kemandirian ekonomi daerah dihitung dengan membandingkan tingkat pendapatan asli daerah dengan bantuan dan pendanaan pemerintah pusat atau provinsi. Semakin tinggi kuota transfer dari pemerintah pusat, semakin kecil kemandirian ekonomi daerah. Rasio kemandirian ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Adapun kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio Efektivitas

Keberhasilan suatu pemerintah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melihat penggunaan keuangan yang efektif pelaksanaan anggaran keuangan. Untuk mengetahui efektif atau tidak kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan rasio efektivitas.

Untuk mengetahui efektivitas keuangan daerah dapat menggunakan perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio Efisiensi

Efisien dan tidaknya penggunaan keuangan daerah dalam penggunaannya dapat diukur dengan rasio efisiensi. Analisis rasio efisiensi adalah dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari 5% retribusi dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efisiensi	Kriteria
100 ke atas	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio Aktivitas

Pelaksanaan realisasi keuangan daerah di dalamnya terdapat banyak aktivitas keuangan untuk pembiayaan kegiatan yang disusun dalam laporan. Untuk mengetahui aktivitas pengelolaan keuangan dapat dibagi menjadi 2 aktivitas. Rasio aktivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan dan mempertahankan pencapaian dari periode ke periode selanjutnya. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari total Pendapatan Asli Daerah. Rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi tahun ke}^n}{\text{Realisasi tahun}^{n-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Tren Kemandirian Keuangan Daerah

Tren kemandirian keuangan daerah ini digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan arah pembangunan yang terlihat meningkat, menurun dan fluktuatif. Tren kemandirian keuangan daerah ini berupa persentase perkembangan dari tahun ke tahun dengan menggunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Rumus tren kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Trend Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{KKD pada } t^0_{+1}}{\text{KKD pada } t_0} \times 100\% \dots (7)$$

Regresi Linier Berganda

Tahap ini menggunakan pendekatan relasional kuantitatif dengan mengolah data observasi supaya pihak lain dapat dengan mudah memahami objek penelitian. Regresi linier berganda digunakan sebagai alat uji yang menganalisis bentuk dan tingkat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Uji Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk memprediksi pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen untuk menunjukkan adanya hubungan fungsional sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0i + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \dots + \beta_nX_{nit} + E_{it} \dots \dots \dots (8)$$



$$BD_{it} = \beta_0i + \beta_1PAD_{it} + \beta_2DP_{it} + E_{it} \dots \dots \dots (9)$$

Keterangan:

BD: Belanja Daerah (Y)

PAD : Pendapatan Asli Daerah (X₁)

DP : Dana Perimbangan (X₂)

β_0i : Konstanta ke i

β_1, β_2 : Koefisien regresi masing-masing variable

i : Jenis Kabupaten/Kota

t : Waktu

Uji Parsial

Uji T atau uji parsial ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah sebagai variabel dependen. Pengujian parsial didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data

Jika probabilitas >0,05 maka H₀ diterima

Jika probabilitas <0,05 maka H₀ ditolak

Uji Simultan

Uji simultan atau uji F adalah uji signifikansi suatu persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik untuk menguji apakah variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama dapat mempengaruhi belanja daerah secara signifikan.

Uji Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) menunjukkan seberapa jauh seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Jika koefisien determinasi meningkat, berarti variabel independen memberikan hasil yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen dengan melihat nilai koefisien determinasi (*R-squared*) yang lebih rendah, berarti variasi variabel dependen terbatas.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terkandung dalam data regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Inilah cara peneliti menggunakan analisis regresi

untuk membandingkan dua variabel atau lebih. Untuk memenuhi standar uji asumsi klasik terdapat tiga uji yang harus dipenuhi, yaitu:

Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi dengan informasi tambahan yang normal. Uji normalitas harus dilakukan untuk melihat bahwa data terdistribusi secara normal untuk setiap variabel yang dianalisis. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Histogram Normality Test

H₀= data residual berdistribusi normal

H₁=data residual tidak berdistribusi normal

Artinya apabila nilai signifikansi $\alpha=0,05$ menunjukkan data tersebut tidak berdistribusi secara normal dan sebaliknya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi dan korelasi yang kuat atau tinggi antara variabel independen diamati. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka model regresi memiliki masalah multikolinieritas. Nilai sering digunakan untuk menunjukkan gejala multikolinieritas dengan melihat toleransi $<0,010$ atau sama dengan nilai VIF (*variance Inflation Factor*) >10

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabilitas variabel residual tidak sama pada semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat menggunakan analisis uji Breusch-Pagan-Godfrey dengan cara meregresi residual absolut variabel dependen terhadap variabel independen. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan seberapa ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Menurut Halim (2002) semakin tinggi tingkat rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat atau provinsi.

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 4 dapat dilihat jika Kabupaten Malang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021) dinyatakan mandiri secara keuangan karena tingkat kemandiriannya secara rata-rata tinggi atau delegatif. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Malang memanfaatkan potensi daerah secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh tinggi dibandingkan dengan dana bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kab. Malang Tahun Anggaran 2012-2021

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda	Kemandirian (%)	Keterangan
2012	197,253,958,805	109,308,887,959	180.46	Delegatif
2013	262,267,260,455	127,284,469,477	206.05	Delegatif
2014	411,185,107,107	206,032,406,701	199.57	Delegatif
2015	461,887,704,825	163,989,032,065	281.66	Delegatif
2016	502,754,981,975	173,895,369,112	289.11	Delegatif
2017	743,313,499,675	267,272,241,741	278.11	Delegatif
2018	585,290,988,836	265,067,691,886	220.81	Delegatif
2019	623,808,877,784	316,903,957,935	196.84	Delegatif
2020	583,846,309,201	243,115,671,694	240.15	Delegatif
2021	669,361,940,837	318,549,918,204	210.13	Delegatif
RATA-RATA			230.29	Delegatif

Delegatif disini merupakan pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Jika pola hubungan menunjukkan delegatif maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat menggunakan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima tanpa harus memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penerimaan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Malang ini mendorong untuk terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus di kawasan Kecamatan Singosari. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yaitu percepatan ekonomi yang dilakukan dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari yang dipilih karena potensi yang dimiliki. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Malang yang dibandingkan dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Pembentukan KEK ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi karena pembentukan KEK ini bertema *heritage and historical tourism* berbasis teknologi. Dengan demikian dapat mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap perencanaan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah. Dengan semakin mampu daerah merealisasikan penggunaan PAD maka kemampuan daerah dianggap baik ditunjukkan dengan tingginya tingkat rasio.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kab. Malang Tahun Anggaran 2012-2021

Tahun Anggaran	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Efektivitas (%)	Keterangan
2012	154,258,004,906	197,253,958,805	127.87	Sangat Efektif
2013	192,761,419,000	262,267,260,455	136.06	Sangat Efektif
2014	255,197,615,474	411,185,107,107	161.12	Sangat Efektif
2015	333,189,097,399	461,887,704,825	138.63	Sangat Efektif
2016	394,872,007,215	502,754,981,975	127.32	Sangat Efektif
2017	426,295,772,668	743,313,499,675	174.37	Sangat Efektif
2018	489,326,953,004	585,290,988,836	119.61	Sangat Efektif
2019	525,974,716,486	623,808,877,784	118.60	Sangat Efektif
2020	715,980,715,185	583,846,309,201	81.54	Cukup Efektif
2021	715,980,715,185	669,361,940,837	93.49	Efektif
	RATA-RATA		121.94	Sangat Efektif

Dalam perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Malang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021) realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah rata-rata setiap tahunnya sangat efektif. Namun, dapat dilihat pada tahun 2020 rasio efektivitas menunjukkan keterangan cukup efektif dimana angka rasio efektivitas menurun cukup jauh. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh adanya pandemic *Covid-19* yang menyebabkan turunnya tingkat rasio efektivitas. Penyebabnya adalah saat pandemi masyarakat tentu banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat pada berkurangnya pendapatan. Sehingga berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, retribusi, kurangnya kegiatan konsumsi sehingga laba badan usaha milik daerah, dan lain-lain dapat berkurang secara cukup drastis. Setelah bangkitnya perekonomian pasca pandemic pada tahun 2021, dapat dilihat bahwa rasio efektivitas mulai meningkat lagi. Hal ini menandakan bahwa bangkitnya perekonomian daerah Kabupaten Malang sehingga target penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga dapat tercapai.

Pemerintah memiliki upaya yang dilakukan untuk memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dalam realisasinya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dapat mencapai target bahkan melebihi target. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang melebihi target dilakukan upaya untuk memanfaatkan potensi daerah yang ada. Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini menandakan bahwa Kecamatan Singosari yang menjadi bagian dari Kabupaten Malang dapat mengelola potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat menjadi indikator yang menunjukkan bahwa kesejahteraan

masyarakat sudah cukup tinggi sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan sektor lain dalam hal ini adalah sektor pariwisata dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari yang berbasis teknologi.

Aktivitas ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan Asli Daerah. Jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang dicita-citakan maka dalam tahun anggaran periode selanjutnya akan tercapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih tinggi. Dapat dilihat bahwa penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari ini difokuskan pada pariwisata berbasis teknologi sehingga dalam implementasinya diharapkan dapat berkontribusi banyak pada salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu peningkatan pendapatan retribusi. Bentuk realisasi dan kesesuaian antara anggaran dengan percepatan pertumbuhan menjadi suatu hal yang terintegrasi, yang secara langsung dapat diukur melalui rasio efektivitas, atas hasil perhitungan rasio efektivitas menyatakan pencapaian target dan realisasi disesuaikan atas kebutuhan yang ada di Kabupaten Malang, secara konkrit akan mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi mendukung KEK Singhasari.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dari masyarakat bisa dikategorikan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 100%. Dengan semakin kecil tingkat rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012-2021

Tahun Anggaran	Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Efisiensi (%)	Keterangan
2012	2,138,791,722	2,218,403,705,874	0.10	Sangat Efisien
2013	2,265,707,688	2,529,685,682,152	0.09	Sangat Efisien
2014	2,595,284,087	3,058,671,277,833	0.08	Sangat Efisien
2015	2,020,159,838	3,471,281,006,611	0.06	Sangat Efisien
2016	2,041,533,731	3,439,632,063,349	0.06	Sangat Efisien
2017	1,919,914,928	3,741,811,706,499	0.05	Sangat Efisien
2018	1,854,211,046	3,824,390,785,365	0.05	Sangat Efisien
2019	2,235,028,161	4,105,659,149,084	0.05	Sangat Efisien
2020	1,159,796,486	3,813,127,410,434	0.03	Sangat Efisien
2021	1,601,299,746	4,089,361,940,837	0.04	Sangat Efisien
RATA-RATA			0.05	Sangat Efisien

Rasio efisiensi Kabupaten Malang pada kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021) dapat dilihat pada tabel 6 sangat efisien. Rasio efisiensi ini membandingkan kemampuan Kabupaten Malang dalam merealisasikan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan biaya yang dikeluarkan dalam memungut Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi membuktikan bahwa Kabupaten Malang menunjukkan kinerja yang efisien dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak sehingga pengeluaran lebih kecil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Kinerja Kabupaten Malang dalam memungut pajak sudah baik dan sangat efisien. Dengan begitu akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malang dimana nanti nilai Pendapatan Asli Daerah akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam memungut Pendapatan Asli Daerah dan dapat digunakan secara optimal.

Dengan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan melihat efisiensi ini mendukung penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dengan pengukuran efisiensi ini dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Malang produktivitasnya cukup tinggi sehingga biaya yang digunakan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah lebih kecil. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakatnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah. Di dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah diperlukan biaya untuk menggali potensi daerah serta pemungutan dalam hal pencapaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah rasio efisiensi di Kabupaten Malang menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan kata lain biaya yang dikeluarkan untuk optimalisasi PAD dan kesesuaiannya sejalan dengan penerimaan peningkatan PAD ketika dihubungkan dengan KEK Singhasari maka dapat dikatakan pencapaian percepatan ekonomi daerah diperoleh melalui biaya yang dikeluarkan dalam memungut PAD sudah sesuai berdasarkan aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Malang sebagai representasi dari aktivitas percepatan KEK Singhasari.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara maksimal. Dengan tingginya tingkat rasio belanja rutin maka tingkat belanja pembangunan yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Dalam perhitungan rasio aktivitas belanja rutin dan belanja pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021) dapat dilihat bahwa sebagian besar anggaran belanja direalisasikan untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang lebih memprioritaskan belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan. Akibat dari alokasi yang tidak seimbang itu dapat

menyebabkan pembangunan yang dilakukan Pemerintah daerah tidak maksimal.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012-2021

Tahun Anggaran	Total Belanja Rutin (dalam ribuan)	Total Belanja Pembangunan (dalam ribuan)	Total Belanja Daerah (dalam ribuan)	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan
2012	1,742,973,419	464,305,242	2,221,707,105	78.45	20.90
2013	1,987,681,038	436,501,502	2,440,509,395	81.45	17.89
2014	2,345,097,453	501,503,673	2,864,314,173	81.87	17.51
2015	2,788,361,556	714,192,895	3,528,236,408	79.03	20.24
2016	2,823,175,833	683,931,346	3,543,281,420	79.68	19.30
2017	2,859,250,632	740,344,342	3,617,054,713	79.05	20.47
2018	2,904,601,424	718,439,018	3,648,517,93	79.61	19.69
2019	2,990,136,898	808,653,391	4,089,403,665	73.12	19.77
2020	2,867,203,282	563,771,007	3,904,352,977	73.44	14.44
2021	3,365,549,592	439,410,242	3,873,441,016	86.89	11.34

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang harus mengevaluasi pengelolaan anggaran belanja supaya pembangunan dapat dilakukan secara pesat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi belanja pembangunan yang ditingkatkan maka dapat berakibat pada maksimalnya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dalam pembentukan dan penetapan KEK Singhasari ini tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pengadaan fasilitas ini menggunakan anggaran belanja daerah sehingga pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan.

Belanja pembangunan yang dialokasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas dan dapat meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari sebagai sektor yang perlu dikembangkan pastinya membutuhkan pembangunan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari walaupun berdasarkan ketetapan dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga perlu memberikan kontribusi dalam proses pembangunan karena nantinya manfaat dari Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari ini dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Dari perhitungan rasio aktivitas belanja didapatkan hasil bahwasanya belanja pembangunan memiliki kontribusi di dalam mendukung percepatan ekonomi yang ada di KEK Singhasari dan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melakukan konsistensi aktivitas ekonomi berbasis ekonomi khusus di kawasan terpusat dengan percepatan alokasi perbandingan antara belanja pembangunan dan belanja rutin harapan

kedepannya dengan ada prioritas belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan menyebabkan ketidak maksimalan di kemudian hari mampu ditekan. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan agar pemerintah bisa lebih fokus kepada belanja pembangunan untuk mendukung aktivitas ekonomi di KEK Singhasari.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan kinerja yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012-2021

Tahun Anggaran	Total PAD	Pertumbuhan (%)
2011	172,333,275,999	
2012	197,253,958,805	14.46
2013	262,267,260,455	32.96
2014	411,185,107,107	56.78
2015	461,887,704,825	12.33
2016	502,754,981,975	8.85
2017	743,313,499,675	47.85
2018	585,290,988,836	-21.26
2019	623,808,877,784	6.58
2020	583,846,309,201	-6.41
2021	669,361,940,837	14.65

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021) dilihat dari pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya. Dari perhitungan rasio pertumbuhan total Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Malang mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020.

Dengan hasil tersebut dapat diketahui kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari periode ke periode berikutnya dinilai baik. Pemerintah Kabupaten Malang juga dapat meningkatkan kinerjanya dengan menentukan peraturan daerah dalam pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan upaya yang dilakukan.

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian salah satunya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di sektor pariwisata dimana retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari pariwisata ini nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah sehingga Kabupaten Malang sebagai salah satu analogi kemampuannya dalam mengelola potensi daerah dan menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkompetensi dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Tren Kemandirian Keuangan Daerah

Tren kemandirian keuangan daerah ini untuk melihat kecenderungan kemandirian keuangan daerah yang penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dari keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012-2021

Tahun Anggaran	Kemandirian (%)	Tren KKD
2012	180.46	
2013	206.05	2.14
2014	199.57	1.97
2015	281.66	2.41
2016	289.11	2.03
2017	278.11	1.96
2018	220.81	1.79
2019	196.84	1.89
2020	240.15	2.22
2021	210.13	1.87

Tren kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah secara rata-rata positif. Setiap tahun kemandirian daerah dalam mengelola keuangan selalu meningkat. Dengan begitu bisa dilihat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam meningkatkan kemandirian ini bisa dikatakan sangat baik. Hal tersebut membuktikan penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkat setiap tahun dan tidak bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tren kemandirian keuangan daerah yang meningkat di Kabupaten Malang menjadi alasan juga untuk ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Kemandirian keuangan daerah yang cenderung meningkat setiap tahun membuktikan bahwa kawasan tersebut memiliki banyak potensi dan memiliki kemampuan untuk mengolah potensi tersebut. Dengan produktivitas dan aktivitas masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan percepatan ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Dari perhitungan keenam rasio diatas dapat membuktikan bahwa Kabupaten Malang dilihat dari kemandirian keuangan daerahnya sangat bagus, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penetapan Kawasan Ekonomi

Khusus di Kecamatan Singosari. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah dalam melakukan percepatan ekonomi di Indonesia. Kabupaten Malang dilihat cukup mampu untuk mengelola keuangan daerah sehingga hal ini nantinya akan berpengaruh pada aktivitas di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis data dengan uji regresi linier berganda yang berguna untuk meramalkan apakah ada pengaruh antara dua variabel independen terhadap variabel dependen untuk membuktikan adanya hubungan fungsional atau tidak, yaitu dengan:

Hasil dari olah data uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	2.72E+09	0.013603	0.9893
PAD	2.227011	2.495559	0.0239
Dana Perimbangan	0.999281	3.723945	0.0018
Adjusted R-squared	0.940999		
F-Statistic	0.000000		

Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing masing variabel dalam penelitian ini variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap variabel dependen Belanja Daerah. Uji ini bisa dilihat dari seberapa besar nilai t hitung yang terdapat pada tabel hasil olah data. Dari hasil tersebut dapat dilihat besarnya nilai signifikansi untuk menguji hipotesis. Dari data diatas dapat dilihat persamaan sebagai berikut:

$$BD = 2723131880.01 + 2.227011PAD + 0.999281DP$$

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai konstanta=2723131889.01, X1=2.227011 dan X2=0.999281. Dari dua variabel independen tersebut hasil menunjukkan <0,05 sehingga dapat menunjukkan hipotesis yang diajukan yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan masing-masing berpengaruh terhadap belanja daerah

Uji Simultan

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui sebesar besar variabel independen dalam penelitian ini pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik

Hasil uji simultan berdasarkan tabel 10 dapat diketahui probabilitas nilai F hitung sebesar 0.0000. Probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari 0,05. Sehingga berdasarkan hipotesis yang diramalkan dapat menolak H0 dan hasil pengujian statistic secara simultan adalah signifikan. Jadi dapat diketahui

bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2003-2021.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam variabel terkait. Nilai determinasi dapat dilihat berdasarkan tabel 10 hasil melalui *Adjusted R-Square*, nilai koefisien ini adalah antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin terbatas dan sebaliknya.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Adj. R-Square sebesar 0.940999 atau 94,09%. Artinya, Belanja Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2003-2021 dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebesar 94,09%. Sedangkan sisanya sebesar 3,91% dijelaskan oleh variabel lain.

Uji Asumsi Klasik

Alat uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Ada tiga pengujian dalam uji asumsi klasik, sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Probabilitas	Centered VIF	Prob. Chi-Square
Normalitas	0.547561		
Multikolinieritas		7.721755	
Heterokedastisitas			0.1430

Uji Normalitas

Regresi akan dianggap baik jika distribusi data yang akan digunakan bersifat normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Histogram Normality Test* dengan membuat hipotesis

H0= Data residual berdistribusi

H1= Data residual tidak berdistribusi

Jika nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ maka data tersebut berdistribusi secara normal

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0,547562 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan data regresi berdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen yang kuat. Apabila

terjadi korelasi antara variabel independen maka terdapat problem atau *multikolinieritas* pada model regresi tersebut. Kriteria pengujian multikolinieritas dilihat dari nilai VIF (*Variation Inflation Factor*) sebagai berikut:

Jika nilai $VIF > 10,0$ maka dapat diartikan terjadi multikolinieritas dalam data tersebut.

Jika nilai $VIF < 10,0$ maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas dalam data tersebut.

Dari tabel 11 dapat dilihat nilai dari *Variance Inflation Factor* variable pendapatan asli daerah dan dana perimbangan adalah 7.721755 sehingga data tersebut lebih kecil dari 10,0. Maka dapat disimpulkan model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Syarat yang harus dipenuhi dalam uji ini sebagai berikut:

H_0 = Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

H_1 = Terjadi masalah heteroskedastisitas

Jika Probabilitas Chi-Square $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat probabilitas chi-square adalah 0,1430 sehingga hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam uji ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil dari olah data dapat diketahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Dengan meningkatnya nilai Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh pada peningkatan alokasi belanja pada setiap tahunnya. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan dengan baik dengan cara menetapkan peraturan daerah tentang kebijakan pajak, retribusi, laba perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang besar dapat berpengaruh pada aktivitas daerah untuk meningkatkan perekonomian.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Rahmi Aminus dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam penelitian ini nilai Pendapatan Asli Daerah yang besar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang. Indikator belanja daerah dapat menyatakan bentuk perbandingan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan dari hasil keseluruhan belanja lebih besar di belanja rutin. Hal itu menyatakan bahwa Kabupaten Malang harapannya diupayakan adanya penguatan atas pembangunan yang terintegrasi dan

sesuai dengan rencana pembangunan aktivitas KEK Singhasari yang merupakan bagian dari kabupaten Malang. Hasil analisis menyatakan nilai 100% tercukupi dari hasil dari belanja rutin dan belanja pembangunan sehingga dianalogikan seluruh belanja terserap dengan baik untuk pemenuhan KEK Singhasari. Dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengelola keuangan dapat menentukan salah satu wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari karena kemandirian keuangan daerah yang sangat baik. Sehingga dengan terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dapat berpengaruh pada percepatan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.

Pengaruh Dana Perimbangan (X₂) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil olah data diatas dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan dapat mempengaruhi alokasi Belanja Daerah. Dana Perimbangan memang diperuntukkan untuk pembangunan daerah. Dalam hal ini Belanja Daerah digunakan untuk pembangunan daerah. Dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja daerah sehingga semakin besar Dana Perimbangan yang diberikan maka semakin besar pula Belanja daerah yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Eky E.R, Warsani P.S, Pandapotan R. dan Dinda F. (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat dan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten langkat.

Dana perimbangan dari pemerintah pusat ini dapat dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana sebagai pelayanan public guna mempermudah masyarakat dalam melakukan produktivitas. Dana perimbangan digunakan untuk menambah pendapatan daerah yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan dialokasikan pada belanja daerah. Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat menggunakan Dana Perimbangan untuk Belanja sarana dan prasarana dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Pembentukan tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan tema yang diangkat sehingga Dana Perimbangan dapat dialokasikan sesuai fungsinya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil olah data uji simultan diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh pada Belanja Daerah. Kemampuan daerah untuk melakukan belanja daerah tergantung dari nilai Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan yang diperoleh oleh daerah. Dengan begitu pembangunan daerah dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Masayu Rahma Wati dan Cartur Matian Fajar (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap belanja Daerah Kota Bandung bahwa hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang masuk dalam kas daerah ini dalam alokasinya digunakan untuk Belanja Daerah. Hal ini berdasarkan kebijakan desentralisasi dimana keuangan suatu daerah dapat diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri termasuk kebijakan yang ditetapkan dan konsekuensi yang diperoleh dari penetapan kebijakan tersebut. Pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah tergantung pada potensi yang ada dalam daerah dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sehingga dapat dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada Kabupaten Malang digunakan untuk menunjang belanja daerah yang bertujuan digunakan untuk pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan ini berpengaruh pada belanja daerah yang dibagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kabupaten Malang, maka bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kabupaten Malang dilihat dari perhitungan enam rasio diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil delegatif, rasio efektivitas menunjukkan hasil sangat efektif, rasio efisiensi menunjukkan hasil sangat efisien, rasio aktivitas menunjukkan aktivitas belanja rutin dan belanja pembangunan yang kurang seimbang, rasio pertumbuhan menunjukkan peningkatan dan tren kemandirian keuangan daerah yang positif menjadi bukti bahwa Kabupaten Malang menunjukkan kinerja yang baik sehingga terpilihnya Kecamatan Singosari sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Pengaruh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah positif signifikan yang dapat dianalogikan bahwasanya atas kenaikan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menyebabkan positif berdampak pada pengeluaran yang dilakukan di Kabupaten Malang sehingga peneliti memberikan kesimpulan harapannya

Kabupaten Malang mendukung pengeluaran kearah penguatan Kecamatan Singosari sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi. 2013. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2):355-65.
- Aritenang, Adiwan F. 2017. "Special Economic Zone at the Crossroads: The Case of Batam." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 21(2):132. doi: 10.22146/jsp.30438.
- DORI SAPUTRA. 2014. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat."
- Elfayang Rizky, Ayu Puspitasari, Abdul Rohman. 2014. "Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013." *Diponegoro Journal of Accounting* 0(0):133-47.
- Ernayani, Rihfenti. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)." *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)* 1(1):43. doi: 10.32487/jshp.v1i1.234.
- Fatimah, Nabiyatun Nur, Anita Nopiyanti, and Danang Mintoyuwono. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah." *Equity* 22(2):197-214. doi: 10.34209/equ.v22i2.936.
- Fitria, Nurul Jannah Lailatul. 2022. "Kawasan Ekonomi Khusus Singosari Sebagai Pembangnan Berkelanjutan Dengan Tema Heritage and Historical Tourism Berbasis Teknologi." *The Indonesia Journal of Public Administration (IJPA)* 8(1):26-42.
- Gareev, Timur. 2013. "The Special Economic Zone in the Kaliningrad Region: Development Tool or Institutional Trap?" *Baltic Journal of Economics* 13(2):113-29. doi: 10.1080/1406099x.2013.10840535.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintah Daerah Tahun 1999*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia. 2004a. *Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia. 2004b. *Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2004*. Vol. 8. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Jaya, Andi Herman. 2021. "Analysis of Regional Financial Independence for the Implementation of Regional Autonomy in Palu City in 2015-2019." *Mantik* 5(1):411-16.
- Karenina, Silvia, Krisna Dwi Andayani, Imanuel Andre Aditya, and Mohammad Wasil. 2021. "Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019." *Journal of Regional Economics Indonesia* 2(1):27-41. doi:

10.26905/jrei.v2i1.6180.

- Masrun, Masrun, Wahidin Wahidin, Titi Yuniarti, and M. Firmansyah. 2022. "Peran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8(1):75–83. doi: 10.29303/jseh.v8i1.17.
- Muttaqin, Eky Ermal, Warsani Purnama Sari, Pandapotan Ritonga, and Dinda Fadillah. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten." *Economics, Business and Management Science Journal* 1(1):22–28. doi: 10.34007/ebmsj.v1i1.7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. 2001. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001* 2003(1):1–5.
- Prakoso, Jalu Aji, Fitrah Sari Islami, and Rr. Retno Sugiharti. 2019. "Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4(1):87–100. doi: 10.31002/rep.v4i1.1344.
- Putra, Rico, and Surya Hidayat. 2016. "Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi." 3(4):243–56.
- Ramadhani, Febby Randria. 2020. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015."
- Saputra, Boni, and Riki Fernando. 2017. "Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 5(3):1515–34.
- Suprayogo, Imam, and Tobroni. 2003. "Metodelogi Penelitian Agama." 102.
- Susanto, Yohanes, and Shinta Wiji Rahayu. 2021. "Analysis of Regional Financial Management of North Bengkulu District Towards Regional Independence in The Autonomy Era." *Ilomata International Journal of Management* 2(1):1–7. doi: 10.52728/ijjm.v2i1.186.
- Suseno, Diky Aji. 2013. "Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal." *Economics Development Analysis Journal* 2(2).